MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:
1. Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan;
2. Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan;
3. Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched*;
4. Penyelenggara jasa multimedia layanan akses internet; dan
5. Pemangku kepentingan lainnya di sektor telekomunikasi.

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET-SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN MEDIA FIBER OPTIK UNTUK AKSES KE PELANGGAN DAN PENYELENGGARAAN JASA MULTIMEDIA LAYANAN AKSES INTERNET MELALUI JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET-SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN MEDIA FIBER OPTIK UNTUK AKSES KE PELANGGAN

1. Umum

Berdasarkan kajian ulasan pasar (*market review*) Kementerian Komunikasi dan Digital dan asosiasi penyelenggara telekomunikasi terkait, penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet (*Internet Service Provider*/ISP) di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Data awal tahun 2025 menunjukkan bahwa utilisasi *bandwidth* nasional sangat rendah, yaitu 28,1% (dua puluh

delapan koma satu persen) dari total *bandwidth* yang tersedia sebesar 20.344 Gbits/s, sedangkan wilayah yang telah mendapatkan layanan akses internet yang disalurkan melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan, yang selanjutnya disebut layanan *fixed broadband* (FBB), sudah mencapai lebih dari 90% (sembilan puluh persen) terhadap jumlah populasi. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi layanan FBB di berbagai wilayah yang pemerataan akses internetnya belum tercapai meskipun jumlah penyelenggara layanan FBB cukup banyak.

Adapun masalah utama yang menjadi perhatian dalam kajian menyangkut tingkat konsentrasi pasar ISP yang tinggi yakni lebih dari 70% (tujuh puluh persen) wilayah didominasi oleh 1 (satu) ISP yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) kapasitas *port Optical Distribution Point* (ODP). Tercatat 48 (empat puluh delapan) kabupaten/kota berada dalam kategori sangat terkonsentrasi, sementara hanya 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota yang tergolong memiliki pasar yang kompetitif atau moderat. Selain itu, terdapat kesenjangan infrastruktur yang ditandai dengan banyaknya *port* ODP yang belum dimanfaatkan secara optimal serta ISP kecil hanya menguasai kurang dari 10% (sepuluh persen) *port* ODP bahkan di beberapa wilayah di bawah 2% (dua persen) sehingga menghadapi kendala dalam bersaing. Meskipun secara nasional ISP hadir di berbagai daerah, tetapi cakupan layanan masih belum merata dengan kecenderungan fokus pada wilayah tertentu.

Sebagai bagian dari upaya penyehatan penyelenggaraan layanan FBB, beberapa wilayah yang telah memiliki layanan lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari total populasi dan memiliki tingkat konsentrasi pasar yang tergolong kompetitif dan moderat dipandang tidak lagi memerlukan tambahan penyedia jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* dan/atau ISP baru. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasar, mendorong peningkatan utilisasi infrastruktur, dan mendukung pemerataan layanan FBB di seluruh Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas dan sejalan dengan permintaan dari asosiasi telekomunikasi terkait, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penataan Kesehatan Penyelenggaraan

Telekomunikasi untuk Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* yang Menggunakan Media Fiber Optik untuk Akses ke Pelanggan dan Penyelenggaraan Jasa Multimedia Layanan Akses Internet melalui Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* yang Menggunakan Media Fiber Optik untuk Akses ke Pelanggan.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud dari Surat Edaran Menteri ini adalah untuk menata kesehatan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pembatasan perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan.

   b. Tujuan dari Surat Edaran Menteri ini adalah agar kebijakan yang ditetapkan dapat meningkatkan utilisasi layanan FBB sehingga kondisi ini diharapkan akan mendukung kompetisi yang sehat serta meningkatkan pertumbuhan industri telekomunikasi dan kualitas layanan FBB.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi penataan kesehatan penyelenggaraan telekomunikasi untuk perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan di 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

g. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1444);

j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17).

5. Pelaksanaan

a. Kementerian Komunikasi dan Digital memberlakukan penghentian sementara permohonan perizinan berusaha:

1) penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan; dan

2) penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan,

untuk 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota, yaitu:

1) Kota Administratif Jakarta Selatan;
2) Kota Administratif Jakarta Barat;
3) Kota Administratif Jakarta Utara;
4) Kota Administratif Jakarta Pusat;
5) Kota Administratif Jakarta Timur;
6) Kota Depok;
7) Kota Bekasi;
8) Kota Bogor;
9) Kota Tangerang Selatan;
10) Kota Bandung;
11) Kota Semarang;
12) Kota Yogyakarta;
13) Kabupaten Sleman;
14) Kota Malang;
15) Kota Madiun;

16) Kota Surabaya;
17) Kota Denpasar;
18) Kabupaten Badung;
19) Kabupaten Gianyar;
20) Kota Medan;
21) Kota Tanjung Pinang;
22) Kota Batam;
23) Kota Pekanbaru; dan
24) Kota Balikpapan.

b. Penghentian sementara permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberlakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini.

c. Pada saat Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku:

1) Permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan yang telah diajukan ke aplikasi *e-telekomunikasi* sebelum ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pelaku usaha yang:

a) telah memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan; dan

b) memiliki komitmen pembangunan jaringan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

sebelum ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini, wajib memenuhi komitmen dimaksud sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha yang diperolehnya.

3) Pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan yang:
   a) tidak memiliki komitmen pembangunan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyediaan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan; dan
   b) telah membangun jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau menyediakan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan,

   pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini, tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

4) Pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan yang:
   a) tidak memiliki komitmen pembangunan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyediaan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan; dan
   b) tidak memiliki jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau tidak menyediakan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan,

   pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum ditetapkannya Surat Edaran Menteri ini, tidak dapat memperluas

pembangunan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyediaan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan telekomunikasi pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

5) Perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan di wilayah selain 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan dan/atau penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet melalui jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan media fiber optik untuk akses ke pelanggan, yang berada pada wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan keterbukaan akses dan/atau pemenuhan standar kualitas layanan.

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital dan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.

e. Surat Edaran Menteri ini dapat diubah dan/atau dicabut oleh Menteri Komunikasi dan Digital berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

MEUTYA VIADA HAFID